

**PENERAPAN METODE *VALUE FOR MONEY* SEBAGAI
TOLAK UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI BALAI RISET DAN
STANDARDISASI INDUSTRI BANDA ACEH
TAHUN 2017-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

**ULYA ANANDA PERMATASARI
NPM. 1802110040**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023-34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan: Akuntansi
Program: Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

TANDA PERSETUJUAN/ PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/ mengesahkan skripsi saudara:

ULYA ANANDA PERMATASARI

NPM: 1802110040

Dengan judul:

**PENERAPAN METODE *VALUE FOR MONEY* SEBAGAI TOLAK UKUR
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
BANDA ACEH TAHUN 2017-2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan:

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui,
Dekan,



Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023-34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan: Akuntansi
Program: Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/ mengesahkan skripsi saudara:

ULYA ANANDA PERMATASARI
NPM: 1802110040

Dengan judul:

**PENERAPAN METODE *VALUE FOR MONEY* SEBAGAI TOLAK UKUR
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
BANDA ACEH TAHUN 2017-2020**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 18 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan:
Komisi Ujian

Ketua,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



(Ulya Ananda Permatasari)

1802110040

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulya Ananda Permatasari
NPM : 1802110040
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENERAPAN METODE *VALUE FOR MONEY* SEBAGAI TOLAK UKUR
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI BANDA ACEH
TAHUN 2017-2020**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non Eklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022

Banda Aceh, 18 Agustus 2022
Yang Menyatakan



ULYA ANANDA PERMATASARI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun 2017-2020”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA dan ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
5. Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Elly Agustina, serta semua keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan mental dan material yang tidak terkira.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama berjuang dari awal hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

Ulya Ananda Permatasari

**PENERAPAN METODE *VALUE FOR MONEY* SEBAGAI
TOLAK UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI BALAI RISET DAN
STANDARDISASI INDUSTRI BANDA ACEH
TAHUN 2017-2020**

**ULYA ANANDA PERMATASARI
NPM: 1802110040**

Pembimbing I: Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
Pembimbing II: Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan organisasi sektor publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang diukur dengan menggunakan pendekatan *value for money*. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan kualitatif deskriptif yaitu dengan menjabarkan fenomena yang terjadi dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan dengan pendekatan *value for money*. Pada pengukuran nilai ekonomis didapatkan tingkat kriteria ekonomis yang terjadi pada tahun 2017 s.d. 2020 dimana Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah mencapai kriteria ekonomis yaitu dengan kisaran rasio 90%-100%. Pada pengukuran nilai efisiensi didapatkan tingkat kriteria tidak efisien yang terjadi pada tahun 2017 s.d. 2020 dimana realisasi anggaran belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan. Sedangkan pada pengukuran nilai efektivitas Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah mencapai kriteria efektif yaitu dengan kisaran rasio efektivitas 90%-100%.

Kata Kunci: Value For Money, Kinerja Keuangan, Balai Riset Dan Standardisasi Industri Banda Aceh

**APPLICATION OF THE VALUE FOR MONEY METHOD AS
A MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE
ASSESSMENT IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS AT
THE RESEARCH AND STANDARDIZATION CENTER FOR
INDUSTRY BANDA ACEH
IN 2017-2020**

ULYA ANANDA PERMATASARI
NPM: 1802110040

Pembimbing I: Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
Pembimbing II: Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of public sector organizations at the Banda Aceh Research and Industrial Standardization Center as measured using a value for money approach. The research method used is descriptive qualitative, namely by describing the phenomena that occur by drawing conclusions from the results of data analysis carried out with a value for money approach. In measuring the economic value, the level of economic criteria that occurred in 2017 up to 2020 where the Banda Aceh Research and Industrial Standardization Center has reached the economic criteria, which is with a ratio of 90%-100%. In measuring the efficiency value, it is found that the level of non-efficiency criteria that occurred in 2017 up to 2020 where the realization of the expenditure budget is greater than the realization of the revenue budget. Meanwhile, the measurement of the effectiveness value of the Banda Aceh Research and Industrial Standardization Center has reached the effective criteria, with an effectiveness ratio of 90%-100%.

Keywords: Value For Money, Financial Performance, Research Institute And Industrial Standardization Banda Aceh

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Praktis	6
1.4.2 Manfaat Akademis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 8
2.1 Akuntansi Sektor Publik	8
2.2 Konsep Kinerja	9
2.2.1 Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja	10
2.2.2 Informasi dan Metode yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja	11
2.3 <i>Value for Money</i>	13
2.4 Informasi Yang Dibutuhkan Untuk Pengukuran <i>Value for Money</i>	16
2.5 Penelitian Sebelumnya	20
2.6 Kerangka Pemikiran	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
3.1 Desain Penelitian	27

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	28
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.1.1 Sejarah Balai Riset dan Standardisasi Industri.....	32
4.1.2 Visi dan Misi Balai Riset dan Standardisasi Industri .	33
4.1.3 Struktur Organisasi	34
4.1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi	36
4.2 Hasil Penelitian	37
4.2.1 Kebijakan Teknis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	37
4.2.2 Basis Akuntansi dan Dasar Pengukuran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	38
4.2.3 Pengukuran Value for Money	39
4.3 Pembahasan	40
4.3.1 Pengukuran Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	40
4.3.2 Pengukuran Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	45
4.3.3 Pengukuran Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	50
4.4 Analisis dan Evaluasi Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 2017 s.d. 2020	4
Tabel 2.1 Kriteria Tingkat Ekonomis	17
Tabel 2.2 Kriteria Tingkat Efisiensi	18
Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Efektivitas	20
Tabel 2.4 Tabulasi Penelitian Sejenis	23
Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Ekonomis	29
Tabel 3.2 Kriteria Tingkat Efisiensi	30
Tabel 3.3 Kriteria Tingkat Efektivitas	31
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh untuk Tahun 2017 s.d. 2020	39
Tabel 4.2 Pengukuran Rasio Ekonomis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	44
Tabel 4.3 Pengukuran Rasio Efisiensi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	49
Tabel 4.4 Pengukuran Rasio Efektivitas Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	54
Tabel 4.5 Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun 2017 s.d. 2020	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka 3E	14
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017	63
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	64
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	65
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut UU No 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan ini dipertimbangkan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Setelah penetapan rencana keuangan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana dialokasikan kepada daerah dan kementerian negara. Dalam mengelola dananya, kementerian memiliki hak dalam membelanjakan anggarannya dalam memenuhi kebutuhan daerah. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui apakah tindak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan dan tingkat pendayagunaan aset yang dimiliki suatu organisasi dan dilakukan untuk melihat nilai efisiensi nilai *input* yang dimasukkan untuk memperoleh nilai *output* dalam perencanaan dan menilai efektivitas dalam memperoleh *outcome*. Pengukuran kinerja keuangan menarik perhatian karena dalam tindak audit yang dilakukan umumnya melibatkan campur tangan dan inisiatif pemerintah dan pada dasarnya memiliki tolak ukur yang digunakan dalam fungsi dan prosesnya (Bar dan Christie, 2015).

Pada era globalisasi saat ini, pengukuran kinerja keuangan perlu dilakukan karena hal ini menjadi daya tarik masyarakat yang semakin cerdas dan terbuka dalam melihat nilai yang diperolehnya dari pelayanan organisasi sektor publik dan melihat kesesuaian penggunaan dana organisasi. Untuk menganalisis kesesuaian penggunaan dana ini dapat dilakukan dengan pengukuran dengan pendekatan *value for money*. Secara konsep, prinsip *good governance* dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dengan tiga kriteria yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Secara berkala pula kriteria-kriteria ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pendanaan pada badan organisasi sektor publik salah satunya kementerian.

Kementerian Perindustrian merupakan salah satu kementerian negara yang memperoleh dana dari APBN. Dana ini digunakan untuk membayar gaji dalam belanja pegawai, pembayaran tunggakan beban kementerian dan alokasi subsidi bagi kementerian dalam memenuhi keperluan lembaga. Selain untuk melakukan pembiayaan bagi kementeriannya, kementerian perindustrian juga mengalokasikan dananya kepada organisasi sektor publik dibawah naungannya salah satunya pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh.

Balai Riset dan Standardisasi Industri merupakan organisasi sektor publik yang memfokuskan kegiatan dalam melakukan riset dan sertifikasi produk. Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah salah satu lembaga dibawah naungan Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian RI. Alokasi dana pada Balai Riset dan Standardisasi Industri dibutuhkan untuk pengembangan teknologi industri, penetapan standar dan penyusunan rencana dan program baik dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan industri.

Sebagai salah satu Balai Riset dan Standardisasi Kementerian Perindustrian RI yang berlokasi di Kota Banda Aceh yang memiliki sumber pendanaan dari APBN, kinerja keuangan diharapkan memperlihatkan transparansi bagi masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi sektor publik dikarenakan beberapa produk yang dihasilkan dari komoditi yang terdapat di Provinsi Aceh akan didistribusikan kepada masyarakat pula serta adanya pengadaan pelatihan dan pengaplikasian produk hasil industri digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk mengurangi persepsi negatif pada distribusi dana APBN setiap tahunnya. Kinerja keuangan sektor publik dapat dikalkulasikan dengan metode *value for money* yang disebut juga dengan istilah *value for investment*.

Pengukuran dengan metode *value for money* ini menganalisis kondisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas organisasi terhadap kinerja keuangan pada anggaran belanja organisasi dimana semua organisasi sektor publik tentu mengalami tekanan untuk lebih efisien karena mempertimbangkan dan memperhitungkan biaya ekonomi dan dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan karena berdampak pada pengeluaran yang dikeluarkan dalam anggaran belanja seperti halnya pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh. Berikut merupakan laporan anggaran dan realisasi belanja dari Balai Riset dan

Standardisasi Industri Banda Aceh yang memperlihatkan gambaran persentase realisasi anggaran belanja dari tahun 2017 hingga 2020 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Balai Riset dan Standardisasi
Industri Banda Aceh 2017 s.d. 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2017	12.825.826.000	11.252.186.856	87,74
2018	13.459.328.000	13.024.853.056	96,77
2019	13.940.140.000	13.512.905.784	96,95
2020	11.389.511.000	10.570.751.307	92,81

Dari tabel diatas, yang merupakan tabel Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh 2017-2020 menunjukkan kenaikan dan penurunan terhadap rasio nilai ekonomis tiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase ekonomis lebih rendah yaitu 87,74% jika dibandingkan tahun yang lainnya dimana pada tahun 2017 ini sudah mencapai kriteria cukup ekonomis. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 96,77% dan terus meningkat di tahun 2019 hingga 96.95% sehingga peningkatan di tahun 2019 ini merupakan realisasi anggaran belanja tertinggi selama 4 tahun terakhir dengan kriteria ekonomis pula namun persentase tersebut mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 92,81% dan tetap mempertahankan kriteria ekonomis.

Selain itu, atas pengukuran nilai efisiensi didapatkan tingkat kriteria tidak efisien yang terjadi pada tahun 2017 s.d. 2020 dimana realisasi anggaran belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan. Anggaran dan

realisasi belanja pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh mencapai rasio efisiensi yang melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang efisiensinya penghematan yang dilakukan pada realisasi anggaran belanja terhadap realisasi anggaran pendapatan tersebut. Hal ini berdampak pada realisasi anggaran belanja yang masih boros dan adanya penggunaan biaya yang tidak diperlukan. Sedangkan pada pengukuran nilai efektivitas Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah mencapai kriteria sangat efektif yaitu dengan kisaran rasio efektivitas 90%-100%.

Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kinerja keuangan pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh belum mencapai target maksimal pada nilai efisiensi. Fenomena ini menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Metode *Value for Money* sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun 2017 s.d. 2020. Kajian fenomena *value for money* ini diharapkan dapat membahas bagaimana organisasi sektor publik mampu mempertahankan kriteria yang sudah sangat baik dan bagaimana cara untuk meningkatkan kriteria *value for money* yang dinilai masih kurang terhadap pengukuran kinerja keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena menduga *value for money* dapat dijadikan metode yang baik dalam menilai kinerja keuangan untuk organisasi sektor publik terkhususnya Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan organisasi sektor publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang diukur dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan organisasi sektor publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang diukur dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut.

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan penerapan ilmu yang telah dipelajari, khususnya bidang akuntansi sektor publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh,

2. Bagi Kementerian Perindustrian

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberikan informasi dan umpan balik atas pengukuran kinerja keuangan pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh sehingga kedepannya dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan dan program yang lebih ekonomis, efisien dan efektif.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan pengembangan ilmu khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan pada organisasi sektor publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*,
- 2) Sebagai bahan referensi bagi pembaca atau peneliti lainnya yang berkenaan dengan penelitian sejenis yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terletak hanya pada pengukuran kinerja keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang diukur menggunakan pendekatan *value for money*. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini terletak pada periode pengamatan data dari tahun 2017 s.d. 2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Organisasi sektor publik memiliki kaitan erat dengan publik sehingga bentuk kegiatan melibatkan publik dalam penyediaan pelayanan dan kebutuhan banyak orang. Organisasi sektor publik mudah dikenali dengan organisasi pemerintah karena pemerintah memiliki peranan dalam mengawasi dan pemerintah juga ikut campur dalam menjalankan organisasi sektor publik. Fokus kegiatan dalam organisasi sektor publik pada pembahasannya memajukan sektor publik yang dianggap tertinggal dan kurang efisien jika dibandingkan sektor swasta.

Kegiatan sektor publik dapat pula dilakukan oleh pihak swasta, namun pada dasarnya akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki perbedaan karakteristik dan sifatnya. Perbedaan tersebut diakibatkan karena adanya beberapa hal yang membedakannya, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur kelembagaan, karakteristik anggaran, *stakeholder* yang dipengaruhi, sistem manajemen/ akuntansi (Majid, 2019: 2). Tujuan organisasi sektor publik tidak untuk memperoleh keuntungan dari program atau kegiatan, sedangkan organisasi sektor swasta memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dijalankannya. Sektor publik sangat berperan dalam penyediaan *public goods* yang didistribusikan kepada masyarakat. Menurut Jones (dalam Mahsun, 2015: 17-18), peran utama sektor publik mencakup 3 hal, yaitu *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods and services*.

1. *Regulatory role*

Tujuan dari *regulatory role* adalah untuk menjamin bahwa masyarakat memperoleh dan dapat mengonsumsi *public goods* bersama-sama.

2. *Enabling role*

Tujuan dari *enabling role* adalah untuk menjamin semua kegiatan masyarakat secara tertib dan aman, sehingga kegiatan sektor publik dapat berjalan dengan lancar.

3. *Direct provision of goods and services*

Tujuan dari *Direct provision of goods and services* adalah untuk menjaga dan mengatur kegiatan pasar produksi dan penjualan barang dan jasa sehingga tidak merugikan publik.”

Sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (Majid, 2019: 2). Secara konsep *value for money* mendasari pengelolaan sektor publik terhadap tiga hal, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. *Value for money* mendeskripsi prinsip umum dalam menjalankan perencanaan sektor publik yang baik, pelaksanaan dan manajemen sehingga *value for money* dapat dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja keuangan sektor publik.

2.2 Konsep Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau mencapai sasaran tertentu (Effendi, 2008: 8). Kinerja adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mulyani dkk, 2018: 204). Kinerja juga disebut sebagai performansi. Performansi adalah bentuk-bentuk catatan yang diperoleh dari fungsi kegiatan tertentu pada waktu tertentu. Menurut Basri dan Rivai (dalam Arisaudi,

2016: 28), kinerja adalah kesiapan dan kesediaan organisasi dalam mengampu suatu kegiatan dengan menyempurnakan sesuai dengan tanggungjawabnya untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kinerja adalah hasil yang diperoleh dalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggungjawab yang telah dilakukan dalam rangka mendapatkan tujuan organisasi.

2.2.1 Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (dalam Fitriani, 2017: 14) indikator kinerja adalah bentuk ukuran kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengukuran dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan hasil yang dicapai untuk mengetahui perkembangan dan upaya dalam mencapai hasil kinerja itu sendiri serta dapat menjadi alat ukur dalam menilai pencapaian kinerja. Adapun syarat-syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut.

1. Spesifik, indikator harus jelas dan dan terfokus.
2. Dapat diukur secara objektif, hasil pengukuran dapat diukur secara statistik dan dapat dibandingkan serta memiliki kondisi yang sama jika ada dua pihak atau lebih yang melakukan pengukuran.
3. Dapat dicapai, indikator yang ditetapkan harus mempertimbangkan kondisi yang akan dapat dicapai.
4. Relevan, suatu kondisi yang harus sesuai dan berhubungan dengan kondisi yang akan diukur
5. Berjangka waktu tertentu, terkait dengan suatu periode yang diukur
6. Dapat dipantau dan dikumpulkan, indikator harus sudah dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pengukurannya.

Indikator kinerja juga dapat berupa hasil dan maupun keluaran. Indikator kinerja hasil berarti segala sesuatu yang dapat mencerminkan gambaran terhadap

fungsi hasil keluaran dari kegiatan tentang seberapa jauh hasil itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut (Harahap, 2013: 43) Indikator kinerja harus memenuhi tujuh kriterianya, sebagai berikut. Indikator kinerja yang baik harus memenuhi tujuh kriteria, yaitu:

1. Langsung. Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.
2. Objektif. Indikator yang obyektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan diukur.
3. Cukup. Indikator kinerja dan indikator-indikator pendukungnya seharusnya cukup mampu mengukur hasil.
4. Kuantitatif (jika mungkin). Indikator kuantitatif adalah indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb).
5. Terinci (jika mungkin).
6. Praktis. Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar.
7. Dapat diyakini. Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh.”

Menurut (Sulisworo, 2009: 1), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai *monitoring* dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut (Zubair & Koton, 2016), Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja merupakan proses melakukan pengukuran tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melihat capaian akhir yang dilaksanakan mengenai efisiensi dan kualitas *output*.

2.2.2 Informasi dan Metode yang Digunakan untuk Pengukuran Kinerja

Sebagaimana indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan nilai kinerja organisasi kerja, dengan demikian indikator kinerja penting untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan organisasi. pengukuran kinerja digunakan data dari hasil kinerja organisasi yang berkaitan dengan penetapan tujuan dan sasaran kerja serta kegiatan yang ditetapkan. Pengukuran data kinerja ini dapat diperoleh dari data internal dan data eksternal organisasi tersebut. Berikut adalah informasi yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran kinerja. Menurut (Mulyani dkk, 2018: 205, 209-210) menyebutkan bahwa informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran kinerja terdiri dari dua hal, yaitu:

1. Informasi Finansial
Penilaian dengan informasi finansial ini dilakukan dengan pengukuran yang didasarkan pada anggaran yang telah dibuat, yang dianalisa pada selisih atau perbedaan antara hasil kinerja aktual dengan yang dianggarkan.
2. Informasi Non Finansial
Informasi non finansial dapat digunakan menambah keyakinan kualitas pengendalian manajemen dan dapat dinyatakan dalam variabel utama seperti variabel yang mengindikasikan faktor penyebab kesuksesan organisasi.

Setelah perolehan data informasi internal dan eksternal organisasi, pengukuran kinerja dilakukan dengan dengan metode atau cara yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Berikut adalah metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja organisasi. Menurut (Harahap, 2013: 73-74), terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut.

1. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya;

2. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya (*benchmarking*); dan
4. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

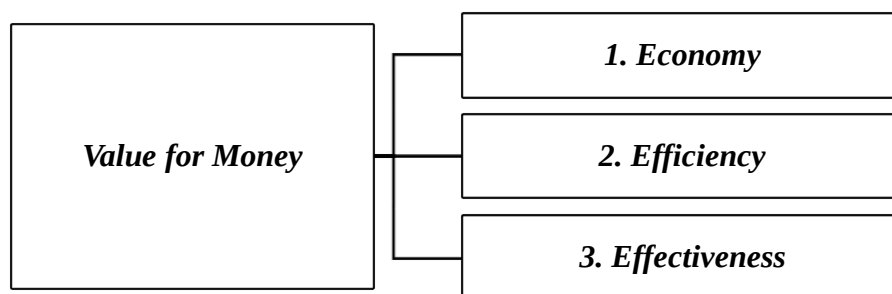
2.3 Value for Money

Value for money dapat diartikan sebagaimana tepatnya dana publik dimanfaatkan. *Value for money* dapat digambarkan secara konseptual sebagai penilaian ekonomi dan merupakan kombinasi antara biaya dan keuntungan sehingga audit *value for money* dapat dilacak dan diketahui pada audit kinerja. Audit kinerja sering diindikasikan dengan ikut campur dan inisiatif pemerintah dan bentuk bukti kinerja pada fungsi dan prosesnya dan sering digunakan sebagai tolak ukur. Penilaian ekonomi digunakan untuk mendukung sumber pengalokasian keputusan yang akan digunakan dalam memperkirakan biaya dan keuntungan. *Value for money* dimaksudkan sebagai biaya efektif yang digunakan sehingga dapat didefinisikan sebagai gabungan antara kualitas dan efektivitas dalam menggunakan pengeluaran pada periode tertentu untuk pembelian barang atau jasa, namun dalam praktiknya tidak dimaksudkan dengan meminimalan pemakaian biaya.

Menurut (Jackson, 2012), *value for money* menjadi lebih menonjol karena perbedaan kriteria kinerja antara *value for money* dengan bidang pengeluaran dan tuntutan pemahaman dalam menunjukkan nilai *value for money*. Perbedaan kriteria kinerja *value for money* berbeda dengan bidang analisis pengeluaran pada organisasi,

dikarenakan dalam hal pengeluaran dana lebih mengedepankan pertanyaan berapa banyak dana yang dibelanjakan untuk kebutuhan tertentu, sedangkan *value for money* mempertanyakan apa saja yang dapat dicapai dengan dana tersebut. Tuntutan pemahaman *value for money* diharapkan agar lembaga-lembaga tertentu dapat memahami dan menunjukkan nilai *value for money* atas apa yang mereka lakukan.

Secara konsep *value for money* dapat digambarkan dengan keseimbangan antara 3E yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Konsep ini tidak menjelaskan tentang metode dalam melakukan pengukuran kinerja, namun memberikan konsep berpikir terkait dengan penggunaan sumber dana dengan baik, bagaimana sumber dana tersebut dapat dipergunakan dengan ekonomis, efisien dan efektif untuk memperoleh *outcome*. Peta konsep *value for money* terlihat pada gambar diagram sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka 3E
Sumber: Barr dan Christie (2015)

Menurut (Scholz, 2020), terdapat 3 aspek berbeda dalam analisis *value for money*, yaitu metode analisis ekonomi, analisis *value for money* dalam evaluasi, dan analisis *value for money* selama implementasi program.

1. Metode Analisis Ekonomi

Analisis dengan pengukuran ekonomi pada dasarnya adalah melakukan ringkasan dalam hal *value for money*. Menurut (Scholz, 2020), terdiri dari 2 metode yang digunakan, metode ini memungkinkan untuk mengukur potensi keuntungan.

1. Metode yang digunakan dengan membandingkan program yang memiliki tujuan akhir yang berbeda
 - a. *Cost-benefit analysis*, atau disebut dengan analisis ekonomi, yaitu dengan mengonversikan *output* dan *outcome* menjadi nilai uang sehingga dapat mengetahui apakah keuntungan yang bernilai uang ini memiliki nilai yang melebihi biaya yang dikeluarkan.
 - b. *Social return on investment*, pada dasarnya memiliki metode yang mirip dengan *cost-benefit analysis*, namun *social return on investment* lebih melihat kepada perbandingan rasio dari keuntungan *cost-benefit analysis*, seperti contoh membandingkan dua program kegiatan yang memiliki tujuan berbeda. Selain itu *social return on investment* juga melihat pada nilai sosial tradisional yang tidak berwujud, ekonomi dan lingkungan dari hasil yang diperoleh.
2. Metode yang digunakan dengan membandingkan program yang memiliki tujuan yang sama
 - a. *Cost effectiveness analysis*, komparasi yang dilakukan biasanya pada indikator yang bernilai kuantitatif, namun metode ini tidak dapat digunakan untuk menilai apakah total keuntungan akan melebihi total biaya yang dikeluarkan.
 - b. *Cost utility analysis*, digunakan pada pengukuran nilai keuntungan yang tidak berwujud atau yang tidak dapat dikonversi kepada nilai uang sehingga *cost utility analysis* dapat dilakukan dengan membandingkan intervensi dalam hal kepuasan terhadap target atau tolak ukur tertentu.”

2. Analisis *Value for Money* dalam Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis *value for money* dalam evaluasi ini adalah pada salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan

sebelumnya. Namun metode ini melihat pada fokus tindakan kedepan dan penyediaan putusan final yang dapat membentuk temuan baru dan rekomendasi. Pada praktiknya, evaluasi mengadakan analisis keuangan dan pengecekan apakah *input* dilaksanakan sesuai dengan biaya yang direncanakan dalam anggaran.

3. Analisis *Value for Money* Selama Implementasi Program

Metode analisis yang digunakan juga termasuk kepada metode analisis ekonomi, seperti *cost-benefit analysis* dan *social return on investment* serta penggunaan pertanyaan dalam pemantauan program.

2.4 Informasi Yang Dibutuhkan Untuk Pengukuran *Value for Money*

Menurut (Arisaudi, 2016: 34) pengukuran *value for money* merupakan pengukuran yang menggunakan konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Menurut Mardiasmo (dalam Arisaudi, 2016: 38), pokok inti dalam pembahasan *value for money* berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, ekonomis membahas mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran dan efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampaknya. Untuk itu dalam pembahasan mengenai analisis kinerja keuangan suatu organisasi berkaitan erat antara 3 pengukuran, yaitu pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas.

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi disebut juga pengelolaan secara hati-hati atau hemat, untuk menghilangkan atau mengurangi biaya yang tak perlu, mengukur tingkat kehematan dari pengetahuan-pengetahuan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Data-data anggaran dan data realisasinya menjadi data yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran tingkat ekonomis pada organisasi sektor publik. Adapun rumus pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Kurnia (2016: 14)

Ekonomi bersifat relatif karena faktor lokasi dan waktu yang terkait dengan harga pasar yang berbeda. Nilai ekonomis ini mengindikasikan alokasi biaya yang mengukur biaya masukan sehingga pengukuran ekonomis ini adalah anggaran yang dialokasikan. Menurut (Harahap, 2013: 74), pada praktik pengadaan barang atau jasa, saat ini terdapat kecenderungan bahwa harga yang ditawarkan oleh penyedia di bawah anggaran ataupun estimasi harga dari organisasi dan selisih ini biasa dikenal sebagai penghematan anggaran. Dalam menilai tingkat ekonomis organisasi, kinerja keuangan dapat diketahui apakah ekonomis atau tidak dengan memenuhi kriteria ekonomisnya, sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Kriteria Tingkat Ekonomis

Ratio Ekonomis (X) (dalam %)	Kriteria
---	-----------------

> 100%	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%- 90%	Cukup Ekonomis
60%- 80%	Kurang Ekonomis
< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi pengukuran dilakukan dengan membandingkan *output* hasil dan yang digunakan. Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efisien apabila produk yang dihasilkan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Data yang diperlukan dalam mengukur efisiensi adalah data realisasi biaya, karena data ini memberikan informasi mengenai pengukuran tingkat *input* terhadap tingkat *output* organisasi sektor publik. Adapun rumus pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Kurnia (2016: 15)

Pengukuran efisiensi merupakan perbandingan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatannya. Aspek ekonomis dan pelayanan publik menjadi penetapan standar belanja organisasi. Ukuran efisiensi yang merupakan pengukuran biaya keluaran, didasarkan pada biaya masukan dan keluaran. Ukuran

efisiensi identik dengan ukuran produktivitas dari biaya masukan yang diterima terhadap biaya keluaran anggaran belanja, namun efisiensi tidak dapat diindikasikan sebagai nilai efektivitas. Dalam menilai tingkat efisiensi organisasi, kinerja keuangan dapat diketahui apakah efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria efisiensinya, sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Ratio Efisiensi (X) (dalam %)	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% -100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

Pada organisasi penilaian efisiensi tidak selalu mengalami tingkatan yang sangat baik karena nilai efisiensi didasarkan pada nilai rasio anggaran masukan dan keluaran organisasi. Untuk itu, penurunan nilai efisiensi organisasi dapat diperbaiki dengan beberapa upaya. Menurut (Harahap, 2013: 75) untuk memperbaiki efisiensi dapat dilakukan tindakan berikut:

1. Meningkatkan keluaran untuk jumlah masukan yang sama;
2. Meningkatkan keluaran dengan proporsi kenaikan keluaran yang lebih besar dibandingkan proporsi kenaikan masukan;
3. Menurunkan masukan untuk jumlah keluaran yang sama; dan
4. Menurunkan masukan dengan proporsi penurunan yang lebih besar dibandingkan proporsi penurunan keluaran.”

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas menunjukkan hubungan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional akan efektif ketika proses kegiatan mencapai sasaran. Target pendapatan sektor publik mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik. Data-data realisasi pendapatan anggaran atau target pendapatan merupakan data yang diperlukan untuk mengukur efektivitas. Adapun rumus pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Kurnia (2016: 18)

Pengukuran efektivitas dibutuhkan dikarenakan pengukuran berdasarkan hasil keluaran dan hasil sesungguhnya yang dicapai serta hasil pengukuran efektivitas dinyatakan dalam deskripsi dan berdasarkan data jangka panjang sehingga nilai efektivitas dapat menggambarkan kesuksesan organisasi, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Menurut (Harahap, 2013: 77) pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur hasil karena suatu pelayanan mungkin diproduksi secara efisien, tetapi tidak efektif karena tidak menambah nilai bagi pelanggan. Dalam menilai tingkat efektivitas organisasi, kinerja keuangan dapat diketahui apakah efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria efektivitasnya, sebagai berikut.

Tabel 2. 3

Kriteria Tingkat Efektivitas

Ratio Efektivitas (X) (dalam %)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%- 90%	Cukup Efektif
60%- 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

2.5 Penelitian Sebelumnya

Terdapat banyak penelitian sejenis yang membahas mengenai analisis kinerja keuangan dengan metode *value for money*, seperti pada penelitian oleh Wuwungan, Tinangon & Rondonuwu pada Tahun 2019 dengan judul “Penerapan Metode *Value for Money* Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado” ini, dilatarbelakangi oleh kurangnya transparansi dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi sektor publik dan mempertanyakan apakah dana yang digunakan sesuai dengan apa yang mereka terima dari program-program yang dijalankan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa banyak terjadi kebocoran dana sehingga hal ini diperlukan dalam analisis *value for money* untuk melihat kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Manado di tahun 2019 dinilai dari sisi ekonomi dan dari sisi efisiensi sudah ekonomis dan sudah efisien namun dari sisi efektifitas dinyatakan tidak efektif.

Pada penelitian oleh Rahayu pada Tahun 2018 dengan judul “Penerapan Konsep *Value for Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang” ini, pentingnya kualitas taraf hidup masyarakat dari segi sektor publik pelayanan Kesehatan dimana rumah sakit merupakan organisasi sektor publik yang menyediakan pelayanan secara umum tanpa mempertimbangkan perolehan keuntungan lainnya. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit harus memiliki perencanaan yang baik dalam merealisasikan anggarannya secara ekonomis, efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang dinilai sudah cukup baik dalam pemenuhan unsur *value for money* dan pengukuran nilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas sudah terlaksana dengan baik.

Pada penelitian oleh Arisaudi pada Tahun 2016 dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan *Value for Money* Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang”. Pada penelitian Arisaudi ini, menggunakan analisis *value for money* dengan pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas pada organisasi sektor publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai kualitas biaya *input* pada pengukuran ekonomis dalam menghindari boros dan tidak produktif, pencapaian *output* maksimal dari *input* awal sektor publik dalam pengukuran efisiensi yang berkaitan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan, dan pengukuran efektivitas dari hasil program yang dijalankan sektor publik. Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan

pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang, tingkat pengukuran ekonomis dinilai sudah ekonomis namun pada pengukuran efisiensi tingkatan yang diperoleh tergolong kepada kriteria kurang efisien, dan kurang efektif pada pengukuran efektivitas.

Pada penelitian oleh Kurnia pada Tahun 2016 dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value for Money* Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”. Pada penelitian Kurnia ini menggunakan analisis *value for money* dengan pengukuran ekonomis, pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas pada organisasi sektor publik pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bentuk perencanaan pembangunan dari pemerintah daerah yang berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD. Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dikategorikan ekonomis. Tingkat efisiensi tahun 2012 dan 2014 berada pada kategori kurang efisien sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 tidak efisien. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 dikategorikan sangat efektif sedangkan pada tahun 2013-2015 kategori efektif.

Pada penelitian oleh Fitriani pada Tahun 2017 dengan judul “Analisis *Value for Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba”. Pada penelitian Fitriani ini Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang pada Dinas Peternakan Dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah yang dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja dan ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E) telah memenuhi syarat *value for money* dimana setiap elemen mencapai nilai rasio yang mencapai maksimal (100%) dan disertai pula penghematan anggaran setiap tahunnya.

Berdasarkan dari beberapa jabaran penelitian sejenis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yang menjabarkan hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut adalah tabulasi penelitian sejenis yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 2. 4
Penelitian Sebelumnya

No.	Peneliti Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Metode <i>Value for Money</i> sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado Wuwungan, Tinangon & Rondonuwu (2019)	Penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Manado di tahun 2018 dinilai dari sisi ekonomi dan dari sisi efisiensi sudah ekonomis dan sudah efisien namun dari sisi efektifitas dinyatakan tidak efektif.	Pemilihan beberapa program yang dijalankan untuk mengidentifikasi indikator kinerja dari program tersebut sehingga diperoleh <i>input</i> dan <i>output</i> program.	Pengukuran efektivitas yang bersifat naratif dan tidak menggunakan kalkulasi dengan formula.

Lanjutan Tabel 2.4

No.	Peneliti Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Penerapan Konsep <i>Value for Money</i> dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang Rahayu (2018)	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang telah memenuhi prinsip <i>value for money</i> , yaitu ekonomis, efesiensi, efektivitas	Penggunaan perhitungan kalkulasi dengan tabel yang menuliskan anggaran sektor publik.	Tidak menjabarkan indikator kinerja sektor publik dari program yang dijalankan dalam perhitungan <i>value for money</i>
3	Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja dengan <i>Value for Money</i> pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang Arisaudi (2016)	<i>Value for money</i> pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2012-2014 sudah ekonomis, tahun 2012 sudah efisien namun pada tahun 2013-2014 belum berjalan dengan baik	Menjabarkan dengan detail hasil perhitungan pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas dari perolehan data sekunder	Menjabarkan struktur organisasi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi sektor publik
4	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang Kurnia (2016)	Tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang dikategorikan ekonomis. Tingkat efisiensi tahun 2012 dan 2014 berada pada kategori kurang efisien sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 tidak efisien. Tingkat efektivitas pada tahun 2012 dikategorikan sangat efektif sedangkan pada tahun 2013-2015 kategori efektif	Menjabarkan dengan detail hasil perhitungan pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas	Tidak menjabarkan analisis pengukuran kinerja berdasarkan <i>input, output</i> dan <i>outcome</i>

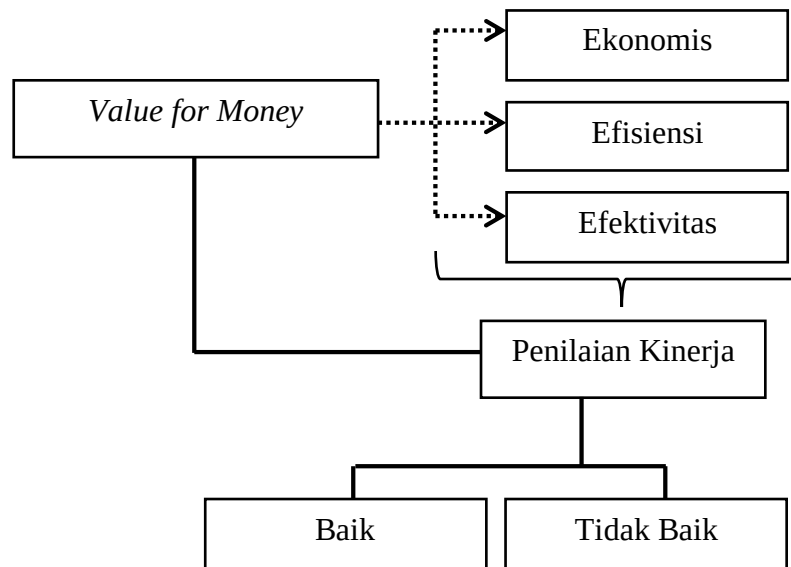
5	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Fitriani (2017)	Elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E) telah memenuhi syarat <i>value for money</i> dimana setiap elemen mencapai nilai rasio yang mencapai maksimal (100%) dan disertai penghematan anggaran setiap tahunnya (ekonomis)	Menjabarkan kriteria realisasi anggaran berdasarkan <i>value for money</i> secara runut dan menganalisis kondisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas	Tidak membahas indikator kinerja dan deskripsi lokasi penelitian seperti visi dan misi organisasi sektor publik
---	--	--	---	---

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja keuangan pada organisasi sektor publik Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang ditinjau dari pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kriterianya. Kajian mengenai ekonomis, efisiensi dan efektivitas ini melihat pada capaian dari anggaran yang ditargetkan sebelumnya. Nilai ekonomis dihitung dari persentase antara perbandingan realisasi anggaran dan anggaran pengeluaran, sehingga nilai ekonomis ini berorientasi dari anggaran masukan yang digunakan untuk belanja sektor publik. Nilai efisiensi dihitung dari persentase antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja, sehingga nilai efisiensi ini melihat pada anggaran masukan dan keluaran yang digunakan untuk belanja sektor publik. Sedangkan nilai efektivitas dihitung dari persentase antara realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja, sehingga nilai hasil dari pengukuran efektivitas ini dapat melihat pada anggaran keluaran yang digunakan untuk belanja sektor publik dan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya apakah organisasi sektor publik ini mampu dalam merealisasikan anggarannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan runut berpikir dari penelitian ini, kerangka pikir yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Analisis Peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Mulyadi 2012), desain penelitian selalu memberi gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan juga memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti lain. Desain dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh dilihat dengan metode *value for money* yang terdiri dari ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2017 s.d. 2020.
- b. Tingkat intervensi atau tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah minimal yaitu hanya sebatas mengumpulkan data dan melakukan penelitian.
- c. Horizon waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah *time series*, yaitu pengumpulan data yang hanya dilakukan secara historis dalam beberapa tahun pengamatan.
- d. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tingkat pemerintahan.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada organisasi sektor publik Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh tahun anggaran 2017 s.d. 2020 yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur, Kota Banda Aceh, Aceh.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Menurut (Siyoto dan Sodik, 2015: 28) data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dokumen grafis seperti catatan, notulen dan lainnya. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa Laporan Keuangan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut yaitu dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode tahun anggaran 2017 s.d. 2020.

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat suatu keputusan yang berlaku umum. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan perhitungan pada rasio *value for money* untuk melihat kinerja keuangan pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh. Adapun rasio

yang dimaksudkan yaitu rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas, dengan rumus yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Rumus Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi dapat meminimalkan *input* sehingga menghindari pengeluaran yang berlebih. Perhitungan nilai ekonomis membandingkan antara pengeluaran anggaran atau realisasi anggaran untuk kegiatan organisasi terhadap anggaran pengeluaran atau anggaran *input* semula yang direncanakan.

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Kurnia (2016: 14)

Hasil perhitungan ekonomis dari data sekunder yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan diidentifikasi kepada salah satu kriterianya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, dengan kriteria ekonomisnya, yaitu:

Tabel 3. 1
Kriteria Tingkat Ekonomis

Ratio Ekonomis (X) (dalam %)	Kriteria
> 100%	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis

80%- 90%	Cukup Ekonomis
60%- 80%	Kurang Ekonomis
< 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

2. Pengukuran Efisiensi

Menilai tingkat efisiensi berhubungan dengan *input* dan *output* yang dibelanjakan oleh organisasi untuk mencapai target tertentu sehingga pengukuran efisiensi digunakan perbandingan antara *input* atau *output* dengan standar target yang direncanakan. Bentuk *input* atau *output* ini berupa hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma. Tingkat efisiensi diukur dengan membendingkan realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatan.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Kurnia (2016: 15)

Hasil perhitungan efisiensi dari data sekunder yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan diidentifikasi kepada salah satu kriterianya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, dengan kriteria efisiensinya, yaitu:

Tabel 3. 2
Kriteria Tingkat Efisiensi

Ratio Efisiensi (X) (dalam %)	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%- 90%	Cukup Efisien
60%- 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

3. Pengukuran Efektivitas

Nilai efektivitas berhubungan dengan *output* dan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan dikatakan efektif ketika mencapai tujuan dan sasaran akhir yang ditetapkan. Untuk itu, perhitungan efektivitas membandingkan realisasi anggaran belanja terhadap target tujuan anggaran belanja yang ditetapkan.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Kurnia (2016: 18)

Hasil perhitungan efektivitas dari data sekunder yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan diidentifikasi kepada salah satu kriterianya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, dengan kriteria efektivitasnya, yaitu:

Tabel 3. 3
Kriteria Tingkat Efektivitas

Ratio Efektivitas (X) (dalam %)	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%- 90%	Cukup Efektif
60%- 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Balai Riset dan Standardisasi Industri

Dalam mensukseskan program pemerintah di sektor industri, balai riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh sebagai unit pelaksanaan teknis dibawah badan penelitian dan Pengembangan industri (BPPI) diharapkan akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari kementerian perindustrian, khususnya melalui kegiatan litbang terapan akan digunakan untuk pelayanan bantuan teknis antara lain teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standardisasi pengujian, penanggulangan pencemaran industri serta rancang bangun dan perekayasaan terutama industri kecil dan menengah. Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yang awalnya bernama Balai Industri didirikan pada tahun 1974/1975 dengan status sebagai Proyek Balai Penelitian Kimia Aceh.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 357/M/SK/8/1980 tanggal 26 Agustus 1980, status Proyek berubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Industri Banda Aceh, yang disingkat dengan Balai Industri Banda Aceh (BIBA), selanjutnya dengan Keputusan Menperindag No. 784/MPP/2002 Balai Industri berubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan (Baristand Indag) dan pada tahun 2006, dengan peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IND/ PER/6/2006 Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan berubah menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh merupakan bagian integral dari Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengembangan dan Penelitian Industri (BPPI) yang berkedudukan di Jakarta. Balai Riset dan Standardisasi Industri (BARISTAND) merupakan salah satu lembaga pengembangan dan penelitian di Aceh, yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Kota Banda Aceh, yang berada dibawah naungan badan penelitian dan pengembangan industri Kementerian Perindustrian. Balai Riset dan Standardisasi Industri memiliki tugas pokok dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri yang sesuai dengan kebijakan teknis Kementerian Perindustrian.

4.1.2 Visi dan Misi Balai Riset dan Standardisasi Industri

Visi Balai Riset dan Standardisasi Industri Industri yaitu “Menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

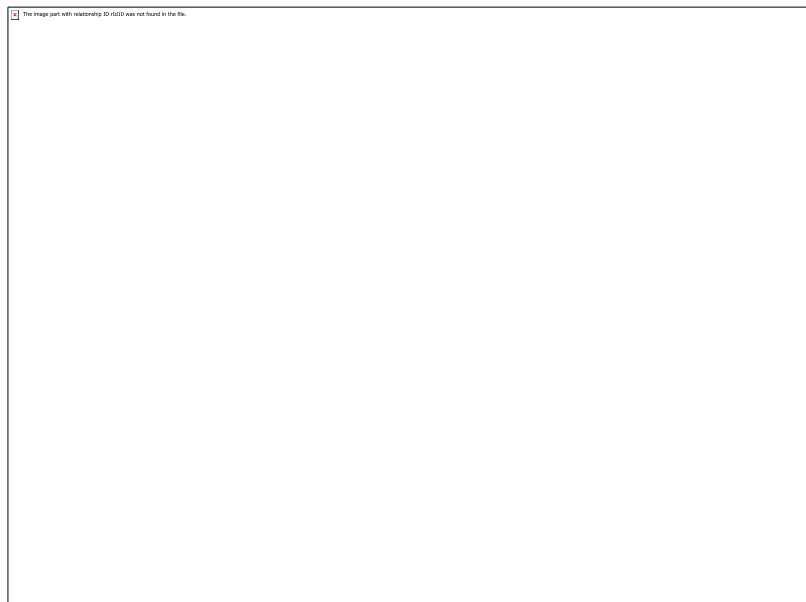
Selain itu, misi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh yaitu melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan,
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan pengembangan industri.

Dalam melancarkan visi dan misi tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh menetapkan tujuan pembangunan industri untuk lima tahun kedepan, yaitu “Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas”. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indicator tujuan yang juga menjadi indicator kinerja utama, yaitu: Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi.

4.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Peranan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh di Provinsi Aceh pada khususnya adalah mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dengan cara lebih memaksimalkan peningkatan kinerja melalui kegiatan riset terapan serta standardisasi dan sertifikasi terhadap industri dalam upaya pengolahan sumber daya alam, kesiapan bahan baku atau bahan pembantu industri yang dapat mensubstitusi impor, meningkatkan kualitas produk industri yang ada sehingga dapat dipasarkan lebih luas secara kompetitif, baik didalam negeri maupun diluar negeri, meningkatkan kapasitas produksi dari industri yang ada melalui riset terapan dan standar sertifikasi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut balai riset dan standardisasi industri banda aceh berpedoman kepada arahan dan kebijakan teknis badan penelitian dan pengembangan industri, dikarenakan balai riset dan standardisasi industri banda aceh difokuskan pada program dan kegiatan di bidang rempah dan minyak atsiri. Meskipun demikian, balai riset dan standardisasi industri banda aceh tetap memperhatikan kebutuhan dan pengembangan kompetensi ini daerah provinsi aceh secara umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat digambarkan bahwa pada dasarnya akuntabilitas kinerja instansi mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi publik tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasionalnya didalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi misi yang telah ditetapkan.

4.1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Balai Riset dan Standardisasi Industri yang dahulunya bernama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan unit pengelola teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sesuai dengan peraturan Menteri perindustrian RI No. 58 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015, maka tugas Balai Riset dan Standardisasi masih mengacu kepada peraturan Menteri Perindustrian No. 49/M-IDN/PER/6/2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri. Adapun tugas Balai Riset dan Standardisasi adalah melaksanakan riset dan standardisasi dan sertifikasi di bidang industri.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk serta penanggulangan pencemaran industri.
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi dan jasa riset dan litbang.
3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.
4. Melaksanakan pemasaran, Kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset, penelitian dan pengembangan.

5. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, dan tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

1.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kebijakan Teknis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh dalam kegiatan operasionalnya memiliki tugas pokok antara lain melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri – Kementerian Perindustrian, sementara itu fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah:

- a. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi
- b. Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai Riset dan Standardisasi, serta menyusun dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang
- c. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan/mesin, dan hasil produksi, serta pencemaran lingkungan.
- d. Melaksanakan pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan bidang

pelatihan teknis, konsultasi, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

- e. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh.

4.2.2 Basis Akuntansi dan Dasar Pengukuran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Kementerian Perindustrian menggunakan dua basis akuntansi, dimana penggunaan dua basis ini sesuai yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akuntansi tersebut terdiri dari:

1. Basis Akrua, meliputi penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.
2. Basis kas, meliputi penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran.

Dasar pengukuran yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar nilai wajar pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai wajar yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut, dan pengukuran digunakan dengan mata uang

rupiah, sedangkan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu kemudian dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.2.3 Pengukuran Value for Money

Pengukuran *value for money* mengenai analisis nilai ekonomis, nilai efisiensi dan nilai efektivitas pada organisasi sektor publik Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh dilakukan untuk menilai kinerja pada pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2017 s.d. 2020.

Tabel 4. 1
Laporan Realisasi Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh untuk Tahun 2017 s.d. 2020

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Tahun 2017			
Jumlah Pendapatan	2.813.074.000	2.630.159.909	93
Jumlah Hibah	0	0	0
Belanja Pegawai	7.975.382.000	6.567.943.400	
Belanja Barang	4.094.817.000	3.931.986.456	
Belanja Modal	755.627.000	752.257.000	
Jumlah Belanja	12.825.826.000	11.252.186.856	88
Tahun 2018			
			94
Jumlah Pendapatan	3.340.006.000	3.130.220.793	0
Jumlah Hibah	0	0	
Belanja Pegawai	6.935.863.000	6.896.967.755	
Belanja Barang	5.034.849.000	4.651.595.701	
Belanja Modal	1.488.616.000	1.476.289.600	97

Jumlah Belanja	13.459.328.000	13.024.853.056	
Tahun 2019			
Jumlah Pendapatan	2.086.270.000	2.778.320.374	133
Jumlah Hibah	0	0	0
Belanja Pegawai	6.754.490.000	6.628.398.914	
Belanja Barang	5.810.987.000	5.513.690.870	
Belanja Modal	1.374.663.000	1.370.816.000	
Jumlah Belanja	13.940.140.000	13.512.905.784	97
Tahun 2020			87
			0
Jumlah Pendapatan	3.200.000.000	2.789.797.168	
Jumlah Hibah	0	0	
Belanja Pegawai	6.040.324.000	5.918.295.277	
Belanja Barang	4.901.612.000	4.206.159.030	93
Belanja Modal	447.575.000	446.297.000	
Jumlah Belanja	11.389.511.000	10.570.751.307	

Sumber: LRA Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat diketahui jumlah anggaran dan realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh. Pada tahun 2017 jumlah pendapatan sebesar Rp.2.813.074.000 dengan realisasi sebesar Rp2.630.159.909 dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp.12.825.826.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.252.186.856. Kemudian Pada tahun 2018 jumlah pendapatan sebesar Rp.3.340.006.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.130.220.793 dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp.13.459.328.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.024.853.056.

Kemudian Pada tahun 2019 jumlah pendapatan sebesar Rp.2.086.270.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.778.320.374 dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp.13.940.140.000 dengan realisasi sebesar Rp.13.512.905.784. Kemudian Pada tahun 2020 jumlah pendapatan sebesar Rp.3.200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.789.797.168 dan jumlah anggaran belanja sebesar Rp.11.389.511.000 dengan realisasi sebesar Rp.10.570.751.307.

1.3 Pembahasan

4.3.1 Pengukuran Ekonomi Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Pengukuran ekonomi dengan formulasi membutuhkan tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu pelayanan publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dapat dilihat dengan rasio realisasi anggaran dengan anggaran pengeluaran. Jika rasio hasil yang diperoleh kurang dari 60% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak ekonomis. Apabila rasio hasil yang diperoleh antara 60%-80% maka dapat dikatakan bahwa anggaran kurang ekonomis. Jika rasio hasil yang diperoleh antara 80%-90% maka dapat dikatakan anggaran cukup ekonomis. Apabila rasio yang diperoleh antara 90%-100% maka dapat dikatakan anggaran ekonomis. Jika rasio hasil yang diperoleh lebih besar dari 100% maka dapat dikatakan anggaran sangat ekonomis.

Perhitungan tingkat ekonomis berdasarkan data dan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 dengan rumus:

--

$$\text{Tingkat Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat ekonomis anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2017-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomis} &= \frac{11.252.186.856}{12.825.826.000} \times 100\% \\ &= 87,73\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 87,73% yang menunjukkan kriteria cukup ekonomis dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana biaya realisasi anggaran sebesar Rp.11.252.186.856 lebih kecil dibandingkan anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 12.825.826.000.

Apabila pemerintah mampu merealisasikan anggaran anggaran sesuai dengan target anggaran pengeluaran maka dapat dinilai pemerintah itu berhasil dalam mengelola organisasi terutama dalam hal mengatur penghematan anggaran. Dalam kontribusinya, anggaran yang paling banyak yaitu anggaran operasional yaitu anggaran belanja pegawai, anggaran belanja modal dan anggaran belanja barang yaitu sebesar dimana kontribusi terbesar diberikan oleh anggaran belanja

pegawai sebesar Rp. 7.975.382.000 dimana anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 6.567.943.400.

b. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomis} &= \frac{13.024.853.056}{13.459.328.000} \times 100\% \\ &= 96,77\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 96,77% yang menunjukkan kriteria ekonomis dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik dimana biaya realisasi anggaran sebesar Rp.13.024.853.056 lebih kecil dibandingkan anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.13.459.328.000.

Apabila pemerintah mampu merealisasikan anggaran anggaran sesuai dengan target anggaran pengeluaran maka dapat dinilai pemerintah itu berhasil dalam mengelola organisasi terutama dalam hal mengatur penghematan anggaran. Dalam kontribusinya, anggaran yang paling banyak yaitu anggaran operasional yaitu anggaran belanja pegawai, anggaran belanja modal dan anggaran belanja barang yaitu sebesar dimana kontribusi terbesar diberikan oleh anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 6.935.863.000 dimana anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 6.896.967.755.

c. Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomis} &= \frac{13.512.905.784}{13.940.140.000} \times 100\% \\ &= 96,93\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2019 rasio ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 96,93% yang menunjukkan kriteria ekonomis dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik dimana biaya realisasi anggaran sebesar Rp.13.512.905.784 lebih kecil dibandingkan anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.13.940.140.000.

Apabila pemerintah mampu merealisasikan anggaran anggaran sesuai dengan target anggaran pengeluaran maka dapat dinilai pemerintah itu berhasil dalam mengelola organisasi terutama dalam hal mengatur penghematan anggaran. Dalam kontribusinya, anggaran yang paling banyak yaitu anggaran operasional yaitu anggaran belanja pegawai, anggaran belanja modal dan anggaran belanja barang yaitu sebesar dimana kontribusi terbesar diberikan oleh anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 6.754.490.000 dimana anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 6.628.398.914.

d. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Ekonomis} &= \frac{10.570.571.307}{11.389.511.000} \times 100\% \\ &= 92,80\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 rasio ekonomis pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 92,80% yang menunjukkan kriteria ekonomis dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik dimana biaya realisasi anggaran sebesar Rp.10.570.571.307 lebih kecil dibandingkan anggaran yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.11.389.511.000.

Apabila pemerintah mampu merealisasikan anggaran anggaran sesuai dengan target anggaran pengeluaran maka dapat dinilai pemerintah itu berhasil dalam mengelola organisasi terutama dalam hal mengatur penghematan anggaran. Dalam kontribusinya, anggaran yang paling banyak yaitu anggaran operasional yaitu anggaran belanja pegawai, anggaran belanja modal dan anggaran belanja barang yaitu sebesar dimana kontribusi terbesar diberikan oleh anggaran belanja pegawai sebesar Rp.6.040.324.000 dimana anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp.5.918.295.277.

Tabel 4. 2
Pengukuran Rasio Ekonomis Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Tahun	Rasio Ekonomis	Kriteria
2017	87,73%	Cukup Ekonomis
2018	96,77%	Ekonomis
2019	96,93%	Ekonomis
2020	92,80%	Ekonomis

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 sebelumnya, perhitungan rasio ekonomis pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh menunjukkan bahwa penganggarannya dapat dikatakan ekonomis dari tahun anggaran 2017 s.d. 2020 dikarenakan berada pada kisaran rasio ekonomis di antara 90%-100%. Semakin besar rasio ekonomis maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah. Balai Riset dan Standardisasi Industri telah mengelola anggaran belanja dengan ekonomis. Dimana ekonomis ini adalah tingkat sejauh mana organisasi dapat meminimalkan input sebagai bentuk upaya dalam penghematan pengeluaran anggaran belanja untuk pelaksanaan kegiatan, program organisasi dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

4.3.2 Pengukuran Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Pengukuran efisiensi menghitung pencapaian *output* yang maksimum terhadap *input* tertentu atau penggunaan *input* terhadap *output*. Efisiensi dikaitkan dengan perbandingan realisasi standar kinerja dengan target yang ditetapkan. Jika rasio hasil yang diperoleh kurang dari 60% maka dapat dikatakan bahwa anggaran sangat efisien. Apabila rasio hasil yang diperoleh antara 60%-80% maka dapat dikatakan bahwa anggaran efisien. Jika rasio hasil yang diperoleh antara 80%-90% maka dapat dikatakan anggaran cukup efisien. Apabila rasio yang diperoleh antara 90%-100% maka dapat dikatakan anggaran kurang efisien. Jika rasio hasil yang diperoleh lebih besar dari 100% maka dapat dikatakan anggaran tidak efisien.

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data dan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2017-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{11.252.186.856}{2.630.159.909} \times 100\% \\ &= 427,81\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efisiensi pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 427,81% yang menunjukkan kriteria tidak efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang tidak baik dimana anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp.11.252.186.856 sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.2.630.159.909.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut hanya diperoleh satu-satunya dari pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.630.159.909. Sedangkan dari unsur realisasi anggaran belanja tersebut

memperoleh kontribusi terbanyak dari anggaran belanja pegawai yaitu sebesar Rp6.567.943.400. Pemerintah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan. Belum diperoleh keberhasilan jika biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran tersebut lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

b. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{13.024.853.056}{3.130.220.793} \times 100\% \\ &= 416,10\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 416,10% yang menunjukkan kriteria tidak efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang tidak baik dimana anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp.13.024.853.056 sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.3.130.220.793.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut hanya diperoleh satu-satunya dari pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.3.130.220.793. Sedangkan dari unsur realisasi anggaran belanja tersebut memperoleh kontribusi terbanyak dari anggaran belanja pegawai yaitu sebesar Rp.6.896.967.755. Pemerintah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan. Belum diperoleh

keberhasilan jika biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran tersebut lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

c. Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{13.512.905.784}{2.778.320.374} \times 100\% \\ &= 486,36\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2019 rasio efisiensi pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 486,36% yang menunjukkan kriteria tidak efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang tidak baik dimana anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp.13.512.905.784 sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.2.778.320.374.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut hanya diperoleh satu-satunya dari pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2.778.320.374. Sedangkan dari unsur realisasi anggaran belanja tersebut memperoleh kontribusi terbanyak dari anggaran belanja pegawai yaitu sebesar Rp.6.628.398.914. Pemerintah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan. Belum diperoleh keberhasilan jika biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran tersebut lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

d. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{10.570.751.307}{2.789.797.168} \times 100\% \\ &= 378,90\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 rasio efisiensi pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 378,90% yang menunjukkan kriteria tidak efisien dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang tidak baik dimana anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp.10.570.751.307 sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.2.789.797.168.

Dari unsur realisasi anggaran pendapatan tersebut hanya diperoleh satu-satunya dari pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.2.789.797.168. Sedangkan dari unsur realisasi anggaran belanja tersebut memperoleh kontribusi terbanyak dari anggaran belanja pegawai yaitu sebesar Rp.5.918.295.277. Pemerintah dikatakan berhasil jika dapat merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan. Belum diperoleh keberhasilan jika biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran tersebut lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Tabel 4. 3
Pengukuran Rasio Efisiensi Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria
2017	427,81%	Tidak Efisien
2018	416,10%	Tidak Efisien

2019	486,36%	Tidak Efisien
2020	378,90%	Tidak Efisien

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 sebelumnya, perhitungan rasio efisiensi pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh menunjukkan bahwa penganggarannya dapat dikatakan tidak efisien dari tahun anggaran 2017 s.d. 2020 dikarenakan berada pada kisaran rasio efisiensi lebih dari 100%. Semakin besar rasio efisiensi akan membuat semakin tidak pula kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi kinerja.

Balai Riset dan Standardisasi Industri dinilai belum dapat mengelola anggaran belanja dengan cara efisien. Penyebab terjadinya ketidakefisienan anggaran tersebut dikarenakan terjadinya pemborosan pada sektor tertentu seperti pada anggaran belanja pegawai yang mendominasi anggaran seperti kebutuhan anggaran dalam melakukan perjalanan dinas atau kegiatan rapat diluar kantor dan pengadaan. Selain itu juga besarnya realisasi anggaran belanja tidak sebanding dengan sedikitnya realisasi anggaran pendapatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh ini.

Upaya untuk mengatasi ketidakefisienan dapat dilakukan dengan melakukan penghematan untuk menghindari boros pada realisasi anggaran belanja seperti pada anggaran belanja pegawai, anggaran belanja modal, dan anggaran belanja barang atau jasa. Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan dianggap tidak memiliki arti

jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

4.3.3 Analisis Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Pengukuran anggaran efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu program organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga kontribusi *outcome* yang semakin besar berpengaruh terhadap perbandingan *output* target yang diharapkan. Jika rasio hasil efektivitas yang diperoleh kurang dari 60% maka dapat dikatakan bahwa anggaran tidak efektif. Apabila rasio hasil efektivitas yang diperoleh antara 60%-80% maka dapat dikatakan bahwa anggaran kurang efektif. Jika rasio hasil efektivitas yang diperoleh antara 80%-90% maka dapat dikatakan anggaran cukup efektif. Apabila rasio hasil efektivitas yang diperoleh antara 90%-100% maka dapat dikatakan anggaran efektif. Jika rasio hasil efektivitas yang diperoleh lebih besar dari 100% maka dapat dikatakan anggaran sangat efektif.

Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan data dan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 s.d. 2020 dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2017-2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{2.630.159.909}{2.813.074.000} \times 100\% \\ &= 93,49\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2017 rasio efektivitas pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 93,49% yang menunjukkan kriteria efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik dimana anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.2.630.159.909 sedangkan target anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.2.813.074.000. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi terbanyak hanya diperoleh dari anggaran pendapatan negara bukan pajak yaitu sebesar Rp.2.630.159.909 dan demikian pula pada target anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp.2.813.074.000.

b. Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{3.130.220.793}{3.340.006.000} \times 100\% \\ &= 93,71\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2018 rasio efektivitas pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 93,71% yang menunjukkan kriteria efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang baik dimana anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.3.130.220.793 sedangkan target anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.3.340.006.000. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi terbanyak hanya diperoleh dari anggaran pendapatan negara bukan pajak yaitu sebesar Rp.3.130.220.793 dan demikian pula pada target anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp.3.340.006.000.

c. Tahun 2019

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{2.778.320.374}{2.086.270.000} \times 100\% \\ &= 133,17\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2019 rasio efektivitas pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 133,17% yang menunjukkan kriteria sangat efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.2.778.320.374 sedangkan target anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.2.086.270.000. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi terbanyak hanya diperoleh dari anggaran pendapatan

negara bukan pajak yaitu sebesar Rp.2.778.320.374 dan demikian pula pada target anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp.2.086.270.000.

d. Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Efektivitas} &= \frac{2.789.797.168}{3.200.000.000} \times 100\% \\ &= 87,18\%\end{aligned}$$

Pada tahun 2020 rasio efektivitas pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh adalah 87,18% yang menunjukkan kriteria cukup efektif dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Hal ini berarti bahwa kinerja pemerintah pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik dimana anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.2.789.797.168 sedangkan target anggaran pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp.3.200.000.000. Dari unsur realisasi anggaran pendapatan yang memberikan kontribusi terbanyak hanya diperoleh dari anggaran pendapatan negara bukan pajak yaitu sebesar Rp.2.789.797.168 dan demikian pula pada target anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp.3.200.000.000.

Tabel 4. 4
Pengukuran Rasio Efektivitas Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	93,49%	Efektif
2018	93,71%	Efektif
2019	133,17%	Sangat Efektif
2020	87,18%	Cukup Efektif

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 sebelumnya, perhitungan rasio efektivitas pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh menunjukkan bahwa penganggarannya dapat dikatakan efektif dari tahun anggaran 2017 s.d. 2020 dikarenakan berada pada kisaran rasio ekonomis di antara 90%-100% dan lebih. Semakin besar rasio efektivitas maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah. Balai Riset dan Standardisasi Industri telah mengelola anggaran belanja dengan cara yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hasil program dengan target yang ditetapkan tercapai.

Berikut adalah data hasil pengukuran rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh.

Tabel 4. 5
Pengukuran Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Tahun 2017 s.d. 2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Rasio Ekonomis	87,73%	96,77%	96,93%	92,80%
Kriteria	Cukup Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
Rasio Efisiensi	427,81%	416,10%	486,36%	378,90%
Kriteria	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
Rasio Efektivitas	93,49%	93,71%	133,17%	87,18%
Kriteria	Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif

Sumber: Analisis Peneliti, 2022

4.4 Analisis dan Evaluasi Anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri

Banda Aceh

a. Tahun 2017

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh tahun 2017 selama periode 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017, jumlah realisasi pendapatan negara tahun 2017 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp.2.630.159.909 dengan jumlah pendapatan operasional sebesar Rp.2.827.025.470. Pendapatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain.

Selama periode berjalan, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah melakukan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran dikarenakan adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada tahun berjalan tersebut.

b. Tahun 2018

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh tahun 2018 selama periode 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2017, jumlah realisasi pendapatan negara tahun 2018 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp.2.630.159.909 dengan jumlah pendapatan operasional sebesar Rp.2.784.389.563. Penerimaan negara bukan pajak

ini terdiri dari pendapatan yang di setor melalui Billing Simponi Bendahara penerimaan sebesar Rp.3.128.740.508, dari pengembalian TUP PNBP sebesar Rp.35.278.000, dari pengembalian TUP rupiah murni sebesar Rp.54.365.700 dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.1.480.285.

Pendapatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh terdiri dari pendapatan penerimaan negara bukan pajak berupa jasa pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi di bidang perindustrian, pendidikan dan/atau pelatihan dan layanan penelitian atau riset dan pengembangan iptek dan pendapatan lainnya. Selama periode berjalan, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah melakukan revisi pada daftar isian pelaksanaan anggaran dikarenakan adanya perubahan akun penerimaan negara, penambahan anggaran belanja modal dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

c. Tahun 2019

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh tahun 2019 selama periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019, jumlah realisasi pendapatan negara tahun 2019 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp.2.778.320.374 dengan jumlah pendapatan operasional sebesar Rp.3.024.344.175. Penerimaan negara bukan pajak

ini terdiri dari pendapatan yang di setor melalui Billing Simponi Bendahara penerimaan sebesar Rp.2.665.217.124, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp.112.600.000 dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp.503.250.

Pendapatan Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh terdiri dari pendapatan penerimaan negara bukan pajak berupa jasa pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi di bidang perindustrian, pendidikan dan/atau pelatihan dan layanan penelitian atau riset dan pengembangan iptek dan pendapatan lainnya. Selama periode berjalan, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah melakukan revisi pada daftar isian pelaksanaan anggaran dikarenakan adanya pergeseran anggaran perawatan kantor gedung, operasional perkantoran dan pimpinan, dan belanja keperluan perkantoran, pergeseran daya dan jasa langganan listrik, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja keperluan perkantoran, serta pergeseran anggaran akibat adanya kebijakan untuk belanja pegawai.

d. Tahun 2020

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh tahun 2020 selama periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020, jumlah realisasi pendapatan negara tahun 2020 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp. 2.789.797.168 dengan jumlah pendapatan operasional sebesar Rp. 3.076.935.952. Penerimaan negara bukan pajak ini terdiri dari pendapatan yang disetor melalui Billing Simponi Bendahara penerimaan berupa pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi

sebesar Rp2.768.871.711, Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek sebesar Rp17.345.000 dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp3.580.457.

Selama periode berjalan, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh telah melakukan revisi pada daftar isian pelaksanaan anggaran dikarenakan adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah dalam rangka mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi covid-19 dan menyelamatkan perekonomian nasional sehingga anggaran untuk beberapa kegiatan belanja barang dan belanja modal dikurangi sebesar Rp.2.751.166.000, dan terdapat penghapusan estimasi penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, serta terjadi realokasi anggaran diantaranya yaitu pemotongan anggaran pada komponen gaji dan tunjangan yang dilakukan dalam rangka penghematan anggaran untuk mendukung PC-PEN dan penambahan anggaran untuk komponen Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh dikategorikan ekonomis dikarenakan berada pada kisaran kriteria rasio ekonomis 90%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah sudah dilakukan dengan cara ekonomis dan seminimal mungkin untuk merealisasikan anggaran untuk program atau kegiatan yang ingin dicapai.
2. Tingkat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh dikategorikan tidak efisien dikarenakan berada pada kisaran kriteria rasio efisiensi lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja yang belum memenuhi syarat efisiensi dalam penghematan penggunaan realisasi anggaran untuk mencapai hasil maksimum dan juga realisasi anggaran pendapatan yang masih minimum.
3. Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2017 dan 2018 dikategorikan efektif karena hasil rasio efektivitas berada diantara 90%-100% sedangkan pada tahun 2019 dikategorikan sangat efektif karena tingkat rasio efektivitasnya lebih dari 100% dan pada tahun 2020 dikategorikan cukup efektif karena hasil rasio efektivitas berada diantara 80%-90%. Hal ini

menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2 Saran

Saran dari peneliti untuk Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh antara lain:

1. Dilihat dari tingkat ekonomis, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh diharapkan lebih mampu melakukan penghematan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan untuk mencapai program atau kegiatan yang ingin dicapai serta dapat mempertahankan nilai ekonomis dalam meningkatkan kinerja agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Dilihat dari tingkat efisiensi, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh diharapkan lebih mampu melakukan perencanaan kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran pendapatan, dikarenakan rasio efisiensi secara keseluruhan dinilai tidak efisien.
3. Dilihat dari tingkat efektivitas, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh diharapkan harus dapat mempertahankan nilai efektif dalam meningkatkan kinerja agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaudi, Z. (2016). *Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Value for Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Barr, J., & Christie, A. (2015, Maret). Improving the Practice of Value for Money Assessment.
- Effendi, T. (2008). *Pengukuran dan Analisis Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Fitriani. (2017). *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Harahap, R. M. (2013). *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Jackson, P. (2012, Mei). Value for Money and International Development. *Deconstructing Myths to Promote a More Constructive Discussion*.
- Kurnia, S. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
- Mahsun. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain dalam Metodologi Penelitian. *Studi Komunikasi dan Media*, 71-80.
- Mulyani, S., Suzan, L., Sagara, Y., K., E. Y., S., C. D., K., Z. N., & M., M. A. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi Di Sektor Publik*. Jatinangor: Unpad Press.
- Rahayu, S. (2018). *Penerapan Konsep Value for Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasirang Pinrang*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Scholz, V. (2020). *Value For Money*. INTRAC.
- Sitoyo, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sulisworo, D. (2009). *Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Riset Akuntansi*, 354-361.
- Zubair, E., & Koton, Y. P. (2016). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018



Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019



 This image part with relationship ID 1088 was not found in the file.

Lampiran

4

Laporan

Realisasi

Anggaran

Tahun

2020

